

**PERAN SERTA KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GANDEKAN
BANTUL**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

DIAN YUDA PRASTIA

NIM. 0441 0843

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Yuda Prastia
NIM : 04410843
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 Desember 2008

Yang menyatakan



Dian Yuda Prastia
NIM. 04410843



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Dian Yuda Prastia
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dian Yuda Prastia
NIM : 04410843
Judul Skripsi : PERAN KOMITE MADRASAH DALAM
PENGEMBANGAN MADRASAH DI MADRASAH
ALYAH NEGERI (MAN) GANDEKAN BANTUL

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2009
Pembimbing

Drs. Rofik, M. Ag.
NIP. 150259571



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/51/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERAN SERTA KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GANDEKAN BANTUL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DIAN YUDA PRASTIA

NIM : 04410843

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Jum'at tanggal 30 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Rofik, M. Ag.
NIP. 150259571

Penguji I

Drs. Sarjono, M.Si.
NIP. 150200842

Penguji II

Sukiman, S.Ag., M.Pd.
NIP. 150282518

Yogyakarta, 05 MAR 2009

Dekan

Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag.
NIP. 150240526

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ.....

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada (kecuali) bila mereka sendiri merubah keadaannya”.(QS. Ar-Ra’du:11)*

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 370.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk:

**ALMAMATER
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَادَنِي عِلْمًا نَا فِعَا وَأَعْطَا نِي رُشْدًا كَمَا مَلَأَ وَجْعَلَنِي حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ أَتْبَعَ

الْهُدَى, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN SERTA KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GANDEKAN BANTUL”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi bimbingan, masukan, kritik dan saran positif pada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam.
3. Ibu Dra. Hj. Afiyah AS, M. Si., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kearifan dan keikhlasan.
4. Bapak Drs. Rofik, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa mengarahkan dengan penuh tanggung jawab disertai keikhlasan dan kesabaran kepada penulis dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah serta pegawai UPT perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Kepala Sekolah MAN Gandekan Bantul, Bapak Tohari Suyuti, Bapak Habib Abdul Syakur selaku Ketua Komite Madrasah serta semua civitas akademika MAN Gandekan Bantul yang dengan sabar memberikan informasi kepada penulis.
7. Abah dan Mama yang telah menjadi suritauladan, motivator utama, sekaligus penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang dan do'a (segalanya) kepada penulis selama ini. Mas Aris yang telah menjadi pembimbing pribadi skripsiku, dek Lutfi yang selalu bertanya "Mas, kapan komputernya dibawa pulang?". Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungannya selama ini.

Penulis menghaturkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan semoga menjadi amal ibadah yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 19 Desember 2008
Penyusun



Dian Yuda Prastia
NIM. 04410843

ABSTRAK

DIAN YUDA PRASTIA. Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gandekan Bantul. Skripsi. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa komite sekolah/madrasah dibentuk sebagai wadah masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat lokal maupun global. Akan tetapi keberadaan komite pun masih dipandang sebelah mata. Masih banyak yang beranggapan komite sekolah/madrasah tidak ubahnya BP3 di masa lampau. MAN Gandekan Bantul telah membentuk komite madrasah MAN Gandekan Bantul pada tahun pelajaran 2003-2004. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana profil komite madrasah dan bagaimana peran komite madrasah MAN Gandekan Bantul dalam pengembangan madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah sehingga kebijakan pendidikan di MAN Gandekan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dengan mengambil latar di MAN Gandekan Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, interview, dan penelusuran dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan pola berpikir induktif guna memperoleh makna dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi baik dengan menggunakan sumber ganda maupun dengan metode ganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) komite madrasah MAN Gandekan Bantul telah dibentuk sejak tahun pelajaran 2003-2004. Proses pemilihan ketuanya berlangsung demokratis maksudnya tidak ada intervensi dari manapun termasuk pihak madrasah. Kepengurusan komite madrasah terdiri dari 14 orang dan dinilai cukup representatif karena sudah memasukkan unsur pemerhati dan praktisi pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, alumni, pihak madrasah dan masyarakat secara umum. (2) komite madrasah MAN Gandekan Bantul telah berperan dalam pengembangan madrasah. Hal ini terbukti dari ide-ide komite madrasah antara lain: (a) menangani bantuan pembangunan gedung serbaguna, (b) mengusulkan dibukanya jurusan baru yang bersifat *life skill* (otomotif), (c) mengusulkan pelatihan karya tulis dan makalah bagi guru, (d) memberi pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan MAN Gandekan Bantul agar sesuai dengan kondisi siswa, orang tua, masyarakat dan tuntutan global, (e) menjadi mediator antara pihak madrasah dan pihak luar seperti ketika mengadakan bakti sosial, bekerjasama dengan Menko Kesra, dan bekerjasama dengan bengkel-bengkel untuk tempat praktek siswa jurusan otomotif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II : GAMBARAN UMUM MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GANDEKAN BANTUL	37
A. Letak Geografis	37
B. Sejarah Berdirinya MAN Gandekan Bantul	38
C. Dasar dan Tujuan Pendidikan MAN Gandekan Bantul	39
D. Struktur Organisasi	40
E. Keadaan Guru, Siswa dan Karyawan	46
F. Keadaan Sarana dan Prasarana	49
BAB III : PERAN DAN FUNGSI KOMITE MADRASAH MAN GANDEKAN BANTUL	51
A. Profil Komite Madrasah MAN Gandekan Bantul	52
1. Nama dan Kedudukan	52
2. Tujuan dan Sifat	56
3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan	57
B. Peran Komite Madrasah MAN Gandekan Bantul	60
1. Pemberi Pertimbangan (<i>Advisory Agency</i>)	61
2. Pemberi Dukungan (<i>Supporting Agency</i>)	63
3. Melakukan Pengawasan (<i>Controlling Agency</i>)	65
4. Mediator	66
C. Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah	69
D. Kendala-kendala yang Dihadapi	86

BAB IV : PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran-saran	91
C. Kata Penutup	92

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel I : Keadaan Guru MAN Gandekan Bantul	46
Tabel II : Keadaan Siswa MAN Gandekan Bantul	47
Tabel III : Keadaan Karyawan MAN Gandekan Bantul	48
Tabel IV : Keadaan Sarana dan Prasarana	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan pendidikan selama beberapa periode mulai dari orde lama sampai berakhirnya orde baru yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto menunjukkan adanya dominasi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga pendidikan baik siswa, guru maupun karyawan, persyaratan penerimaannya bahkan pakaian dan jenjang kenaikan pangkatnya diatur oleh pemerintah pusat di Jakarta untuk diberlakukan di seluruh tanah air. Antara sekolah/madrasah yang berstatus negeri akan berbeda jauh (dari segi anggaran, subsidi, mutu dan peminat) dengan sekolah/madrasah yang berstatus swasta.¹

Sistem sentralisasi seringkali dinilai menjadi penghambat laju pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam setiap kebijakan pendidikan, tanpa menilik pada kebutuhan secara kedaerahan. Pemerintah daerah yang sebenarnya lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerahnya terabaikan perannya. Hal ini berakibat fatal pada mutu pendidikan di setiap daerah terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang tidak bisa mengimbangi persaingan dalam bidang pendidikan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di

¹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Pres, 2003), hal. 32-33.

daerah tersebut. Berdasarkan parameter yang dikeluarkan UNDP pada tahun 2000 tentang kualitas sumber daya manusia, Indonesia menempati urutan ke 109.²

Menurut Nurkolis, beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain *pertama*, pemerintah selalu ingin menguasai sektor pendidikan. Semua keputusan-keputusan strategis pendidikan sangat bersifat sentralistik. Pemerintah mengabaikan peran lembaga pendidikan dan masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang ada.

Kedua, perhatian utama peningkatan mutu pendidikan selalu difokuskan pada proses pembelajaran. Perbaikan tersebut seringkali hanya “sebatas kelas” saja mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, materi pembelajaran dan kualitas guru. Perbaikan yang ada selalu tidak mengena pada wilayah yang lebih luas, seperti perbaikan manajemen dan menciptakan iklim budaya kerja serta kepemimpinan sekolah yang baik.

Ketiga, para guru selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya. Sementara di pihak lain nasib mereka sendiri kurang diperhatikan. *Keempat*, selama ini pendidikan di Indonesia tidak memiliki standar baku mutu (*benchmark*) yang bisa dijadikan patokan. Standar baku ini dapat berisi aspirasi yang dapat diterima dari sudut pandang siswa, orang tua, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. *Kelima*, birokrasi pendidikan dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikat pendidikan yang sesungguhnya.³

² Amiruddin Siahaan, dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Quantum Theaching, 2006), hal. 3.

³ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. xvi-xvii.

Sejak bergulirnya reformasi pada pertengahan 1998, telah terjadi gelombang perubahan dalam segala sendi kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini merupakan pergeseran terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini menggunakan paradigma sentralistik selanjutnya bergeser menuju paradigma desentralistik. Perubahan orientasi paradigma ini diberlakukan melalui penetapan perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah, yang lebih sering kita dengar dengan terminologi “otonomi daerah”.

Diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah berdampak pada semua sistem kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia tidak lagi menganut sistem sentralistik yang cenderung birokratis.⁴ Pengelolaan pendidikan tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah pusat di Jakarta, melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah hanya membuat standar isi untuk kemudian disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah oleh pemerintah daerah masing-masing.

Keinginan pemerintah agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi yang menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan hakikat otonomi daerah. Sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi seluruh elemen esensial diharapkan muncul dari pemerintah kabupaten dan kota sebagai penerima wewenang otonomi. Pendidikan yang

⁴ Amich Alhumam, “Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi”, www.kompas.com, dalam Google.com, 2000.

selama ini dikelola secara terpusat (sentralistik) harus diubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang. Otonomi pendidikan sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional.⁵

Dalam dunia pendidikan khususnya lembaga persekolahan, manifestasi dari diberlakukannya otonomi daerah adalah dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah menekankan pada kewenangan lembaga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan lembaganya secara otonom (mandiri).⁶ Manajemen Berbasis Sekolah dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan yang selama ini dinilai masih belum merepresentasikan harapan para pengguna pendidikan (masyarakat).⁷

Ditetapkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam BAB IV UU Sisdiknas dalam pasal 8 dan 9 “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Serta Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.⁸

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

⁶ Nurkolis, “Hakikat Desentralisasi Model MBS”, www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2001.

⁷ Amiruddin Siahaan, dkk, *Manajemen ...*, hal. 28-30.

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hal. 64.

Masyarakat dalam konteks MBS lebih dimaksimalkan perannya. Masyarakat tidak hanya berkecimpung dalam bidang penbiayaan semata, tetapi juga dilibatkan dalam pengembangan madrasah di satuan pendidikan.⁹ Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan diharuskan untuk membentuk komite sekolah di setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap kinerja satuan pendidikan dalam menjalankan setiap kebijakan pendidikannya.¹⁰

Sebagai konsekwensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan, maka diperlukan wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari

⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 30.

¹⁰ Khaeruddin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hal. 247-248.

budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.¹¹

Dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 BAB XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 56 menyebutkan “(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis, (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.¹²

Komite sekolah dibentuk dengan maksud untuk dapat mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab serta peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

¹¹ Khaeruddin, dkk, *Kurikulum*, hal. 248-249.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan*, hal. 86.

Oleh karena itu, jelas sekali terlihat bahwa peran komite sekolah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Justru hakikat sesungguhnya dari dibentuknya komite sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Akan tetapi semua itu masih terbatas pada idealisme yang belum terejawantahkan secara nyata sepenuhnya. Komite sekolah tidak ubahnya BP3 yang hanya dilibatkan dalam masalah pembiayaan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan. Hasil riset *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di Jakarta pada 2003 menunjukkan angka 58% guru dan 59,9% orang tua siswa menganggap Komite Sekolah sama dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Bahkan yang lebih parah 37,6% orang tua belum pernah mendengar tentang komite sekolah.¹³ Padahal komite dibentuk agar bisa menjadi representasi kepentingan *stakeholder* yang memerlukan inisiatif serta peran aktif masyarakat di semua tingkatan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gandekan Bantul sebagai lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama telah mengikuti alur yang ditetapkan oleh pemerintah. MAN Gandekan Bantul telah membentuk dan memiliki komite sekolah yang diharapkan dapat menunjang pengembangan madrasah menuju lebih baik.¹⁴

Untuk mencapai maksud tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam bentuk mendayagunakan kemampuan yang ada

¹³ Ade Irawan, "Kontroversi Komite Sekolah", www.kompas.com. dalam Google.com. 2004.

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. Tohari Suyuti (Sekretaris Komite Madrasah MAN Gandekan Bantul), tanggal 5 April 2008.

pada orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian di bidang pendidikan. Selain sebagai pengontrol, komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan serta memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah untuk peningkatan dalam pengembangan sekolah/madrasah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan madrasah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Gandekan Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi komite madrasah di MAN Gandekan Bantul?
2. Bagaimana peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi komite madrasah di MAN Gandekan Bantul.
- b. Untuk mengetahui peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk memperkaya wawasan dan pengembangan pengetahuan penulis.
- b. Sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi madrasah untuk lebih memaksimalkan peran komite madrasah dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan madrasah.
- c. Untuk menjadi dasar pijakan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Secara konseptual, berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan, masih sedikit sekali skripsi yang membahas tentang komite sekolah. Bahkan penulis baru menemukan satu skripsi yang secara khusus membahas tentang komite sekolah, yaitu skripsi yang ditulis Siti Marlina (2004) dengan judul “Optimalisasi Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta”.¹⁵ Skripsi tersebut lebih menekankan peran komite kelas paralel yang dihuni oleh orang tua/wali dari setiap siswa sehingga

¹⁵ Siti Marlina, “Optimalisasi Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

terkesan skripsi tersebut mengungkap tentang peran orang tua dalam membantu memaksimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam di luar kelas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua yang tergabung dalam komite kelas paralel ikut membantu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan melakukan pengawasan ketika siswa berada di rumah.

Skripsi yang ditulis Asri (2005) dengan judul “Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah”.¹⁶ Jenis penelitian pada skripsi tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam skripsi ini mengungkap tentang sejarah madrasah dimulai dari era orde lama hingga orde baru dan bagaimana kesiapan madrasah dalam menghadapi era otonomi daerah. Hasil penelitian skripsi tersebut lebih menekankan pada pemberdayaan manajemen madrasah dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah.

Skripsi Heti Lestari (2005) dengan judul “Problematika Pendidikan Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Gandekan Bantul Yogyakarta”.¹⁷ Skripsi ini bersifat deskriptif yang mengulas tentang problematika pendidikan akhlak yang ada di MAN Gandekan Bantul. Secara konseptual, skripsi ini jelas berbeda dengan tema yang penulis angkat. Namun, dalam hal lokasi/tempat penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan sehingga patut dijadikan acuan untuk mengetahui setting lokasi penelitian.

Ketiga skripsi di atas jelas mempunyai perbedaan dengan tema yang penulis angkat. Dari segi cakupan pembahasan skripsi di atas hanya sebatas

¹⁶ Asri, “Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷ Heti Lestari, “Problematika Pendidikan Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Gandekan Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

masalah peran orang tua dalam pembelajaran di luar kelas dan sejarah madrasah dalam upayanya menghadapi era otonomi daerah. Sedangkan tema yang penulis angkat akan membahas peran masyarakat lewat komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul sebagai bentuk respon masyarakat (*stakeholder*) terhadap pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

E. Landasan Teori

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menekankan pada otonomi sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.¹⁸

MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan sebagainya yang tumbuh dari aktifitas, kreatifitas dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah berada di bawah monitoring pemerintah agar mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan

¹⁸ E. Mulyasa, *Manajemen ...*, hal. 11.

jati dirinya dalam membina peserta didik, guru dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah.¹⁹

2. Komite Sekolah

a. Pengertian

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Komite sekolah merupakan lembaga non profit dan non politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan.²⁰

Ditegaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 bahwa komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²¹

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

¹⁹ E. Mulyasa, *Manajemen ...*, hal. 14.

²⁰ Khaeruddin, dkk, *Kurikulum ...*, hal. 247-249.

²¹ Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, "Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah", www.dikdasmn.org, dalam *Google.com*, 2007.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta aktif masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih dari sekedar pengumpul dana pendidikan dari orang tua siswa, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.²²

b. Peran, Fungsi dan Tujuan

Peran yang dapat dijalankan oleh komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan.²³

Sebagai badan pertimbangan, perannya meliputi:

- a) Perencanaan sekolah.
 - b) Pelaksanaan program.
 - c) Pengelolaan sumber daya pendidikan.²⁴
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

²² Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002, diambil dari www.CBE.org. dalam Google.com. 2007.

²³ Sri Renani Pantjastuti, dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hal. 81-83

²⁴ Sukron, "Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah", www.pendidikan.net, dalam Google.com., 2005.

Sebagai pendukung, perannya meliputi:

- a) Pengelolaan sumber daya.
 - b) Pengelolaan sarana dan prasarana.
 - c) Pengelolaan anggaran.²⁵
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁶

Komite sekolah melakukan pengawasan yang meliputi:

- a) Mengontrol perencanaan program sekolah
 - b) Memantau pelaksanaan program.²⁷
- 4) Mediator antara pemerintah (*executive*), dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan masyarakat di satuan pendidikan.²⁸

Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

²⁵ Sukron, "Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah", www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2005.

²⁶ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002, www.CBE.org, dalam Google.com, 2007.

²⁷ Sukron, "Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah", www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2005.

²⁸ Muh. Arif Efendi, "Pemberdayaan Komite Sekolah", www.radarbanten.com, dalam Google.com, 2008, Lihat juga dalam Khaeruddin, dkk, *Kurikulum ...*, hal. 250-251.

- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - (a) Kebijakan dan program pendidikan.
 - (b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - (c) Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - (d) Kriteria tenaga kependidikan; dan
 - (e) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁹

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Jadi, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat adalah sebagai berikut:

²⁹ Khaeruddin, dkk, *Kurikulum ...*, hal. 251-252.

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.³⁰

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan dan hasil di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

3. Pengembangan Madrasah

Madrasah secara kelembagaan perlu dikembangkan dari sifat reaktif dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi *rekonstruksionistik-sosial*.³¹ Menjadi *rekonstruksionistik* berarti pendidikan madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan.

Untuk memiliki kemandirian menjangkau keunggulan, filosofi ini perlu dijabarkan dalam strategi pendidikan madrasah yang visioner, lebih memberi nilai tambah strategis, dan lebih meningkatkan harkat dan martabat manusia. Strategi pengembangan pendidikan madrasah perlu dirancang agar mampu menjangkau alternatif jangka panjang, mampu menghasilkan perubahan yang signifikan, ke arah visi dan misi lembaga

³⁰ Khaeruddin, dkk, *Kurikulum ...*, hal. 250.

³¹ Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2004), hal. 37.

sehingga akan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terhadap bangsa-bangsa lain.

Pengembangan madrasah di satu pihak tidak boleh apriori terhadap tren pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, internasionalisasi, universalisasi, seperti komputerisasi, vokasionalisasi dan ekonomisasi. Tetapi di lain pihak pengembangan madrasah harus tetap tegar dengan karakteristik khas yang dimilikinya sebagai *bumper* kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral dan spiritual.

Berbagai prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan madrasah, antara lain:

1. *Membangun prinsip kesetaraan*, antara sektor pendidikan madrasah dengan sektor pendidikan di luar madrasah, dan dengan sektor-sektor lainnya. Kehadiran sistem pendidikan madrasah harus senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama sistem yang lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat. Hakikat eksistensi adalah ko-eksistensi. Pendidikan madrasah bukan sesuatu yang secara eksklusif terpisah dari sistem sosialnya. Pendidikan madrasah sebagai sistem merupakan sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.³²

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem

³² Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 21.

pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya. Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.³³

2. *Prinsip perencanaan pendidikan.* Oleh karena manusia dan masyarakat senantiasa berubah, mengalami perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik yang dapat diterima maupun yang harus ditolak, maka pendidikan juga harus dituntut cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat dan secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. Pendidikan madrasah bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan, akan tetapi

³³ Qusyairi, “Berikan Kewenangan Daerah Mengelola Madrasah”, www.koranpendidikan.com, dalam Google.com, 2003.

mampu mengendalikan perubahan itu. Pendidikan madrasah harus mampu mengantisipasi perubahan itu.³⁴

Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang.³⁵

3. *Prinsip rekonstruksionis*. Dalam kondisi masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar, artinya juga perubahan dengan skala besar berdasarkan gagasan besar, maka pendidikan madrasah juga harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan besar tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang.³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 21.

³⁵ Raharjo, "Madrasah Sebagai The Centre Of Excellence", www.dipertais.com, dalam Google.com, 2005.

³⁶ Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 21-22.

Tahap ini diawali dengan pemetaan masalah yang dihadapi di masa kini dan mendatang. Ada dua pandangan yang harus dilakukan: retrospektif (pandangan ke masa lalu) dan prospektif (pandangan ke masa depan). Pandangan pertama merupakan studi historis tentang apa yang telah dilakukan madrasah yang terfokus untuk mencari kelemahan dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mencari relevansinya jika memang ingin tetap dipertahankan, dalam konteks tuntutan dan tantangan kehidupan sekarang dan mendatang.

Sementara pandangan kedua merupakan upaya melahirkan gagasan yang sifatnya antisipatoris. Antisipasi merupakan dasar dalam usaha menimbulkan kegiatan inovatif, yang hanya akan timbul jika ada kemampuan untuk berantisipasi (memperkirakan secara sistematis dan realistis terhadap apa yang mungkin terjadi). Inovasi muncul sebagai hasil dari persiapan menyambut apa yang diperhitungkan akan terjadi. Kemampuan untuk mengantisipasi, bukan sekedar untuk memproyeksikan kecenderungan sekarang menuju masa depan. Ia menuntut adanya kemampuan untuk menghayati situasi imajiner di samping kemampuan untuk mengevaluasi situasi nyata.

Berdasarkan dua jenis kemampuan ini akan mungkin bagi pihak pengembang madrasah untuk bertindak kreatif dalam berantisipasi, menciptakan alternatif-alternatif menyongsong masa depan.³⁷

4. *Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik.* Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang bersifat umum maupun spesifik harus menjadi pertimbangan. Pendekatan pendidikan untuk anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan pendidikan anak perkotaan. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya perlakuan khusus bagi kelompok ekonomi lemah, berkelainan fisik atau mental.³⁸

Kurikulum madrasah juga digarap sedemikian rupa untuk memacu keunggulan dalam aspek muatan lokal, ketrampilan-ketrampilan vokasional, dan ekstra kurikuler. Dalam pengembangan muatan lokal di madrasah model dimungkinkan penambahan jam belajar diluar jam sekolah, sehigga siswa berada lebih lama di madrasah. Muatan lokal bisa berbentuk ciri khas keunggulan daerah seperti kesenian, budaya, bahasa, ketrampilan khusus, sesuai dengan kebutuhan. Ketrampilan vokasional merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh keahlian khusus di bidang-bidang

³⁷ Zainal Muttaqien, "Strategi Pengembangan Madrasah", <http://elmuttaqie.wordpress.com>, dalam *Google.com*.

³⁸ Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 22.

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, seperti pertanian, perbengkelan, tata-busana, tata-boga, dan lain-lain.

Sedangkan kegiatan ekstra adalah kegiatan pendukung yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan minat dan bakat, misalnya seni, pramuka, palang-merah, pecinta-alam, organisasi siswa, koperasi pelajar, musik, drumband, komputer, dan lain sebagainya.³⁹

5. *Prinsip pendidikan multibudaya.* Sistem pendidikan madrasah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang tidak kalah pentingnya dengan acuan-acuan yang lain. Pluralisme merupakan paham yang menghargai perbedaan, dan akan baik bila pendidikan madrasah dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai dinamika yang bersifat konstruktif, apalagi diikat oleh kesamaan pandang ideologi.
6. *Prinsip pendidikan global.* Pendidikan madrasah harus mampu berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam kontelasi masyarakat global, dengan tetap mewajibkan untuk melestarikan karakter agamis-patriotis. Pembinaan karakter agamis-patriotis tetap relevan dan bahkan harus dilakukan.⁴⁰

Pengembangan pendidikan di madrasah, selain memiliki kewajiban untuk menjadikan manusia yang beriman,

³⁹ Abdul Mukti Bisri, "Dinamika Madrasah Model, Unggulan dan Terpadu Sebuah Studi Kebijakan", <http://pendis.depag.go.id>, dalam *Google.com*, 2008.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 22-23.

bertakwa dan berakhlak, juga memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan manusia yang cerdas dan pandai, memiliki kewajiban untuk menjadikan manusia hidup lebih baik, termasuk dalam hal keduniaan. Pengembangan pendidikan harus diarahkan agar peserta didik termotivasi untuk mau mempelajari dan ingin mengembangkan diri.⁴¹

Berikut ini beberapa langkah awal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi madrasah saat ini:

1. Manajemen Madrasah.
2. Koordinasi pembinaan dan pengembangan madrasah.
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas profesionalisme tenaga kependidikan.
4. Pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan personil madrasah.
5. Melengkapi sarana fisik dan komponen pendidikan madrasah.
6. Pemberdayaan dan optimalisasi fungsi komponen pendidikan dan sumber belajar.
7. Pemberdayaan madrasah sebagai lingkungan pendidikan yang kredibel.
8. Desiminasi informasi program dan perkembangan madrasah.⁴²

⁴¹ Anonimus, “Keberlangsungan Pendidikan di Madrasah. Wujud Kesadaran Umat Islam”, www.hupelita.com, dalam Google.com, 2007.

⁴² Departemen Agama RI, *Desain...*, hal. 49-52.

4. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Community Based Education/Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) adalah konsep pendidikan yang menekankan pada paradigma pendidikan dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan nasional.⁴³

Pengelolaan pendidikan/madrasah dihadapkan pada berbagai macam tuntutan lokal agar dapat diakomodir dengan baik, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan pendidikan di madrasah menjadi sangat signifikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah memberikan bukti bahwa pendidikan yang berbasis masyarakat mempunyai daya tahan yang luar biasa, karena didukung oleh masyarakat yang merasa memilikinya, pondok pesantren adalah sebuah bukti nyata.

Namun mengembalikan kekuatan masyarakat yang telah diabaikan begitu lama tidaklah mudah. Paradigma lama telah mengaburkan pikiran mengenai pendidikan yang selayaknya. Karena kita harus beralih ke sebuah paradigma reformasi yang baru dan mungkin gagasan pendidikan berbasis masyarakat dapat dijadikan sebuah titik masuk. Pendidikan berbasis sekolah mungkin lebih tepat dilihat dari sebuah perbaikan pendidikan yang lebih luas, yakni di dalam kerangka pendidikan berbasis masyarakat menuju sebuah masyarakat mendidik atau mengajar.⁴⁴

⁴³ Fadliyanur, "Pendidikan Berbasis Masyarakat", <http://fadliyanur.multiply.com>, dalam *Google.com*, 2007.

⁴⁴ Siti Aminah Rofi'i, "Pendidikan Berbasis Masyarakat Lebih Bersifat Sosial dan Pengabdian", <http://koranpendidikan.com>, dalam *Google.com*, 2008.

Kalau di dalam sistem pemerintahan sudah mulai dirintis dengan otonomi daerah, maka sejalan dengan itu di dalam pendidikan dirintis pendidikan yang berbasis masyarakat yakni usaha untuk menumbuhkan pendidikan dari bawah, agar pendidikan berakar di masyarakat, dengan inisiatif dari masyarakat dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan partisipasi semua elemen (*stakeholder*) terutama orang tua dan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dikembangkan model pendidikan berbasis masyarakat, di mana proses pendidikan tidak terlepas dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai basis keseluruhan kegiatan pendidikan. Semua potensi yang ada di masyarakat apabila dapat diberdayakan secara sistemik, sinergik dan simbiotik, melalui proses yang konsepsional, dapat dijadikan sebagai upaya yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴⁵

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Di bidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Karena partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya sebuah Komite Sekolah yang berperan sebagai semacam

⁴⁵ Fadliyanur, "Pendidikan Berbasis Masyarakat", <http://fadliyanur.multiply.com>, dalam *Google.com*, 2007.

lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan.⁴⁶ Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite tersebut.

Sedikitnya ada dua hal yang membuat pendidikan berbasis masyarakat mutlak diperlukan:

- a. Wilayah yang luas dan lingkungan (sosial, budaya, dan geofisik) yang bervariasi, tidak memungkinkan adanya pendekatan pendidikan yang seragam, baik dalam tujuan khususnya maupun di dalam implementasinya.
- b. Pendidikan yang bersifat kontekstual hanya dapat diciptakan apabila situasi dan kondisi masyarakat yang sangat berbeda-beda di manfaatkan sepenuhnya sebagai unsur yang penting di dalam pengembangan pendidikan.⁴⁷

Untuk berperan sebagai kekuatan pendidikan nasional, sekaligus untuk memberikan sumbangan sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka pendidikan berbasis masyarakat harus bercirikan:

- a. Pola pengembangan yang melibatkan seluruh potensi di dalam masyarakat untuk turut bertanggungjawab mengenai mutu

⁴⁶ Abu Hadfi Effendi, "Pendidikan Berbasis Masyarakat", www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2008.

⁴⁷ Rengganis, "Pendidikan Berbasis Masyarakat Menuju Otonomi Daerah Kaltim", <http://renggani.blogspot.com>, dalam Google.com, 2007.

pendidikan setempat khususnya, mutu pendidikan nasional pada umumnya.

- b. Pola swadaya yang mengutamakan pengelolaan sendiri pendidikan di dalam konteks masyarakat, meliputi antara lain:
 - 1) Penentuan prioritas program pendidikan yang khas
 - 2) Penyediaan dana operasional dan infrastruktur
 - 3) Pengadaan tenaga-tenaga yang kompeten
 - 4) Pelaksanaan dan pemantauan secara menyeluruh
 - 5) Penilaian dan peningkatan efisiensi dan efektifitas
- c. Pola pendidikan dan pelaksanaan secara umum merujuk pada pedoman yang bersumber pada Undang-undang pokok pendidikan nasional, serta dari ketentuan hukum lain yang dinilai perlu untuk pengembangan pendidikan secara nasional.

Prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat antara lain:

- a. Determinasi Sendiri, semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Bantuan Sendiri, anggota masyarakat menjalankan sebaik-baiknya segala tugasnya dan kapasitas untuk membantu memaksimalkan dan mengembangkan.
- c. Pengembangan Kepemimpinan, pemimpin setempat harus dilatih keterampilan seperti pemecahan persoalan, pengambilan keputusan, dan proses kelompok sebagai sarana membantu diri sendiri yang berkesinambungan dan usaha-usaha perbaikan masyarakat.
- d. Lokalisasi, potensi terbesar terjadi ketika layanan, program dan kesempatan masyarakat untuk terlibat ada di mana orang-orang tinggal.
- e. Penyampaian Pelayanan Terpadu, kerja sama yang terpadu antara organisasi dan agensi yang beroperasi untuk publik dapat memenuhi tujuan mereka sendiri dan melayani dengan baik publik

- dengan bekerja sama dengan organisasi dan agensi yang bekerja dengan tujuan yang sama.
- f. Mengurangi Duplikasi Layanan, masyarakat harus menggunakan secara penuh sumber daya fisik, finansial, dan manusia, dalam lokasi mereka sendiri dan mengkoordinasikan usaha-usaha mereka tanpa layanan duplikasi.
 - g. Menerima Perbedaan, penyatuan hal yang berbeda (perbedaan umur, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, suku, agama, orang cacat) pada penduduk menjamin pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelayanan dan kegiatan masyarakat.
 - h. Respon Institusi, melayani kebutuhan publik yang terus berubah adalah tanggung jawab institusi publik karena mereka ada untuk melayani publik
 - i. Pembelajaran Sepanjang Hayat, kesempatan belajar secara formal dan nonformal harus tersedia pada anggota masyarakat pada segala umur.⁴⁸

Dalam pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat tersebut ada tiga pokok catatan yang perlu menjadi perhatian, *pertama*, kemampuan ekonomi masyarakat pendukung madrasah masih lemah. *Kedua*, madrasah terutama madrasah swasta, dinaungi oleh yayasan yang acap kali berkultur sangat kaku dan cenderung otoriter. Yayasan berlaku sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan madrasah dalam arti yang luas. *Ketiga*, para pengelola madrasah kurang memahami secara mendalam dan luas peran serta fungsi mereka.⁴⁹

Dari tiga hal di atas, sangat jelas bahwa mau tidak mau, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dinafikan, bahkan keterlibatan mereka menjadi sangat penting demi kemajuan madrasah.

⁴⁸ Sunarno, "Menuju Pendidikan Berbasis Masyarakat", <http://sunarno196.blogspot.com>, dalam Google.com, 2007.

⁴⁹ Riwayat, "Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat", www.lpmp-kalbar.net, dalam Google.com, 2006.

Karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk di berdayakan pada setiap madrasah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.⁵¹

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah situasi yang wajar atau sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja, yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian tentang peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul.

2. Penentuan Subyek Penelitian

Metode penentuan subyek dapat diartikan sebagai usaha penentuan sumber data, bagaimana data dalam penelitian itu akan diperoleh.⁵²

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 3.

⁵¹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian; Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 109.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 20.

Subyek penelitian di sini adalah sumber di mana data penelitian dapat diperoleh. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber atau informan kunci

Pengurus dan anggota komite sekolah MAN Gandekan Bantul

b. Sumber atau informan pendukung

1) Kepala Sekolah MAN Gandekan Bantul.

2) Orang tua/ wali siswa.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang lengkap, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan tujuan. Dalam mengumpulkan data atau memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi dapat dipahami sebagai pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diamati.⁵³ Teknik observasi yang penulis gunakan adalah jenis observasi non partisipan yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan, tidak ikut serta dalam kegiatan.⁵⁴ Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Observasi ini dimaksudkan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh komite madrasah MAN Gandekan Bantul seperti

⁵³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 158.

⁵⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 216.

mengamati rapat komite madrasah dengan pihak madrasah, rapat komite madrasah dengan orang tua/wali siswa dan pihak madrasah, mengamati pengontrolan komite madrasah terhadap kondisi madrasah dan mengamati sarana dan prasarana yang ada di MAN Gandekan Bantul.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik yang menekankan pada proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interviewee*).⁵⁵ Wawancara juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden.⁵⁶

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul. Pihak-pihak yang akan diwawancarai antara lain pengurus dan anggota komite madrasah, kepala sekolah dan orang tua/wali siswa.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode untuk mencari data yang bersumber dari tulisan-tulisan, arsip-arsip, seperti buku, majalah, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.⁵⁷

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 59.

⁵⁶ Margono, *Metodologi ...*, hal. 165.

⁵⁷ Amirul Hadi dan Harjono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 135.

- 1) Struktur organisasi dan kepengurusan MAN Gandekan Bantul.
- 2) Struktur organisasi komite madrasah di MAN Gandekan Bantul.
- 3) Program-program komite madrasah MAN Gandekan Bantul.
- 4) Dokumen/notulen rapat komite madrasah MAN Gandekan Bantul.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.⁵⁸

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁹

Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisa data yang dilakukan melalui:

a. Reduksi data

Data dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 280.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 248.

jasas tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis membuat rangkuman tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting.

b. Display data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang berupa uraian deskriptif yang panjang. Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca.

c. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitas dan obyektivitas hasil penelitian, dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori.⁶⁰

Dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan pola berfikir induktif yakni pola berfikir yang bertolak dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.⁶¹ Maksud dari analisis secara induksi yaitu penelitian kualitatif

⁶⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998), hal. 263.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 47.

tidak dimulai dari suatu teori tertentu, akan tetapi berangkat dari fakta empiris.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan terhadap kebenaran data dan penafsirannya dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk mengetahui keabsahan data tersebut pada waktu yang berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan pula.

Triangulasi yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Baik dengan metode yang berbeda maupun sumber yang berbeda. Misal, membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau hasil wawancara dengan informan kunci dibandingkan dengan hasil wawancara dengan informan pendukung.⁶²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut, yakni bagian awal, inti, dan akhir. Adapun pada bagian awal, penulis menyajikan halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, hal. 178.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gandekan Bantul. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri, dasar dan tujuan pendidikan MAN Gandekan Bantul, struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan karyawan serta sarana dan prasarana yang ada di MAN Gandekan Bantul. Sebagai gambaran tersebut perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai hal tentang komite madrasah dan perannya dalam pengembangan madrasah pada bagian selanjutnya.

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data beserta analisis tentang komite madrasah dan perannya dalam pengembangan madrasah. Pada bagian ini uraian difokuskan pada profil komite madrasah MAN Gandekan Bantul, peran komite madrasah MAN Gandekan Bantul secara umum, peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah di MAN Gandekan Bantul dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama antara komite madrasah dan pihak madrasah MAN Gandekan Bantul dalam rangka pengembangan madrasah.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah bab IV. Bab ini disebut penutup yang memuat simpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengurai dan mengemukakan data dan analisis dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, komite madrasah MAN Gandekan Bantul telah dibentuk sejak tahun pelajaran 2003-2004. Proses pemilihan ketuanya berlangsung demokratis, maksudnya tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk pihak madrasah. Kepengurusan komite madrasah terdiri dari 14 orang dan dinilai cukup representatif karena sudah memasukkan unsur pemerhati dan praktisi pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, alumni, pihak madrasah dan masyarakat secara umum.

Kedua, komite madrasah MAN Gandekan Bantul telah berperan dalam pengembangan madrasah. Hal ini terbukti dari ide-ide komite madrasah antara lain: (a) menangani bantuan pembangunan gedung serbaguna, (b) mengusulkan dibukanya jurusan baru yang bersifat *life skill* (otomotif), (c) mengusulkan pelatihan karya tulis dan makalah bagi guru, (d) memberi pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan MAN Gandekan Bantul agar sesuai dengan kondisi siswa, orang tua, masyarakat dan tuntutan global, (e) menjadi mediator antara pihak madrasah dan pihak luar seperti ketika mengadakan bakti sosial, bekerjasama dengan Menko Kesra, dan bekerja sama dengan bengkel-bengkel untuk tempat praktek siswa jurusan otomotif.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak madrasah.

Karena maksud dibentuknya komite madrasah MAN Gandekan Bantul adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat agar menciptakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pihak madrasah seharusnya lebih memaksimalkan peran komite madrasah untuk tujuan pengembangan madrasah. Pihak madrasah diharapkan lebih sering mengadakan diskusi dengan komite madrasah untuk menentukan program-program baru yang sesuai dengan tuntutan jaman dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga tidak ada kesan komite madrasah hanya dimanfaatkan ketika ada sumbangan yang menuntut melewati jalur komite madrasah.

Pihak madrasah juga tidak perlu menganggap komite madrasah sebagai momok yang menakutkan yang bisa menghambat kinerja dan kewenangan kepala madrasah.

2. Untuk komite madrasah.

Semua anggota komite madrasah diharapkan tidak hanya diam ketika dilakukan rapat baik rapat dengan pihak madrasah maupun dengan wali siswa. Seharusnya komite madrasah lebih aktif karena sudah diberi kepercayaan sangat besar oleh masyarakat untuk bisa memfasilitasi kepentingan mereka. Selain itu peneliti juga berharap agar komite madrasah merekrut perwakilan siswa untuk masuk ke dalam keanggotaan komite. Kendati siswa ini tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan

keputusan tetapi siswa mempunyai hak berpendapat sehingga dapat terlihat kebutuhan-kebutuhan siswa tentang pendidikan yang sebenarnya.

3. Untuk masyarakat (wali siswa).

Perlu adanya pemahaman lebih giat lagi tentang keberadaan komite madrasah yang sebenarnya. Komite bukanlah BP3 yang hanya terlihat ketika ada penarikan dana dari sekolah. Masyarakat harus bisa memanfaatkan komite madrasah sebagai kepanjangan tangan dari mereka.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu sungkan atau takut untuk mengkritisi maupun memberi saran terhadap kinerja madrasah, dan komite akan menindak lanjuti kepada pihak madrasah.

C. Kata Penutup

Alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn, puji syukur kepada Allah SWT atas pertolongan, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan berlapang dada penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan di masa yang akan datang. Penulis juga sangat berharap kepada para pembaca agar dapat mengambil manfaat dari skripsi ini untuk menambah wawasan bagi para pembaca yang benar-benar membutuhkan, apalagi untuk diadakan penelitian lebih lanjut, karena sesungguhnya sifat dari kesimpulan setiap penelitian ilmiah adalah kesementaraan (*tentative*).

Wallahu a‘lam bi aṣ-ṣawāb

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumam, Amich, "Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi", www.kompas.com, dalam Google.com, 2000.
- Anonimus, "Keberlangsungan Pendidikan di Madrasah. Wujud Kesadaran Umat Islam", www.hupelita.com, dalam Google.com, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asri, "Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Bisri, Abdul Mukti, "Dinamika Madrasah Model, Unggulan dan Terpadu Sebuah Studi Kebijakan", <http://pendis.depag.go.id>, dalam Google.com, 2008.
- Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2004.
- Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, "Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah", www.dikdasmen.org, dalam Google.com, 2007.
- Effendi, Abu Hadfi, "Pendidikan Berbasis Masyarakat", www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2008.
- Efendi, Muh. Arif, "Pemberdayaan Komite Sekolah", www.radarbanten.com, dalam Google.com, 2008.
- Fadliyanur, "Pendidikan Berbasis Masyarakat", <http://fadliyanur.multiply.com>, dalam Google.com, 2007.
- Hadi, Amirul dan Harjono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Irawan, Ade, "Kontroversi Komite Sekolah", www.kompas.com, dalam Google.com, 2004.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, www.CBE.org, dalam Google.com, 2007.

- Khaeruddin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Lestari, Heti, “Problematika Pendidikan Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Gandekan Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Marlina, Siti, “Optimalisasi Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Pres, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mulyasa, E., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Suatu Panduan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- , *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mumtakhin, “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah”, [www.pakguruonline.pendidikan.net.](http://www.pakguruonline.pendidikan.net), dalam *Google.com.*, 2005.
- Muttaqien, Zainal, “Strategi Pengembangan Madrasah”, [http://elmuttaqie.wordpress.com.](http://elmuttaqie.wordpress.com), dalam *Google.com.*
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998.
- Nurkolis, “Hakikat Desentralisasi Model MBS”, [www.pendidikan.net.](http://www.pendidikan.net) dalam *Google.com.*, 2001.
- , *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Okvina, “Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan”, [http://okvina.wordpress.com.](http://okvina.wordpress.com), dalam *Google.com.*, 2008.
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.

- Qusyairi, “Berikan Kewenangan Daerah Mengelola Madrasah”, www.koranpendidikan.com, dalam Google.com, 2003.
- Raharjo, “Madrasah Sebagai The Centre Of Excellence”, www.dipertais.com, dalam Google.com, 2005.
- Rengganis, “Pendidikan Berbasis Masyarakat Menuju Otonomi Daerah Kaltim”, <http://renggani.blogspot.com>, dalam Google.com, 2007.
- Riwayat, “Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat”, www.lpmp-kalbar.net, dalam Google.com, 2006.
- Rofi’i, Siti Aminah, “Pendidikan Berbasis Masyarakat Lebih Bersifat Sosial dan Pengabdian”, <http://koranpendidikan.com>, dalam Google.com, 2008.
- Sagena, Unggul, “Desentralisasi dan Demokratisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah”, www.sinarharapan.co.id, dalam Google.com, 2007.
- Siahaan, Amiruddin, dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: Quantum Theaching, 2006.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian; Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sukron, “Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah”, www.pendidikan.net, dalam Google.com, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sunarno, “Menuju Pendidikan Berbasis Masyarakat”, <http://sunarno196.blogspot.com>, dalam Google.com, 2007.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.



LAMPIRAN

PEDOMAN DOKUMENTASI DAN OBSERVASI

A. Pedoman Dokumentasi

1. Gambaran Umum

- Letak Geografis
- Sejarah berdirinya dan perkembangan madrasah
- Visi, misi dan tujuan
- Penjelasan singkat tentang kurikulum madrasah
- Struktur organisasi Sekolah
- Keadaan guru, karyawan dan siswa

2. Komite Sekolah

- Pengertian dan nama
- Kedudukan dan sifat
- Struktur organisasi dan kepengurusan
- AD/ART komite sekolah
- Tujuan, fungsi, dan peran komite sekolah
- Rencana program komite sekolah

B. Pedoman Observasi

- Letak MAN Gandekan Bantul
- Pelaksanaan program-program komite sekolah
- Mengenai keadaan karyawan, guru dan siswa
- Kondisi fasilitas, sarana dan prasarana madrasah secara umum

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Kepala Sekolah

1. Identitas personal
2. Situasi dan kondisi MAN Gandekan Bantul secara umum
3. Sejarah singkat MAN Gandekan Bantul
 - Kapan MAN Gandekan Bantul didirikan?
 - Bagaimana sejarah berdirinya MAN Gandekan Bantul?
 - Bagaimana perkembangannya sampai sekarang?
 - Bagaimana struktur organisasinya?
 - Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang MAN Gandekan Bantul?
 - Bagaimana kondisi guru dan karyawan baik jumlah maupun pendidikannya?
4. Tentang kerjasama komite sekolah dan sekolah
 - Dasar dan tujuan dibentuknya komite sekolah MAN Gandekan Bantul
 - Bagaimana keadaan orang tua siswa, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan penghasilannya?
 - Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dengan komite sekolah?
 - Apakah sama antara fungsi BP3 (yang dulu) dengan komite sekolah?
 - Siapa saja yang menjadi anggota komite sekolah

- Faktor pendukung dan penghambat kerjasama komite sekolah dan madrasah
- Hasil kerjasama dengan komite sekolah
- Harapan kepada komite sekolah

B. Kepada Komite Sekolah

1. Identitas personal
2. Sejarah dibentuknya komite sekolah MAN Gandekan Bantul
3. Proses pemilihan ketua komite dan rekrutmen anggotanya.
4. Peran dan fungsi komite sekolah
5. Tugas komite sekolah
6. Program komite sekolah
7. Peran komite sekolah dalam pengembangan madrasah
8. Apakah komite sekolah ikut dilibatkan dalam pengambilan kebijakan madrasah, bagaimana bentuknya?
9. Apakah peran komite sekolah dirasa sudah cukup optimal?
10. Usaha yang dilakukan komite sekolah terkait dengan pengembangan madrasah.
11. Faktor penghambat dan pendukung

C. Kepada Waka kurikulum

1. Identitas personal
2. Apakah ada komunikasi antara komite sekolah dan waka kurikulum terkait dengan sistem pembelajaran di MAN Gandekan Bantul?
3. Bagaimana sumbangsih komite sekolah dalam pembelajaran?

D. Kepada Orang tua/ wali

1. Identitas personal.
2. Apakah bapak/ ibu tahu tentang komite sekolah MAN Gandekan Bantul?
3. Apakah bapak/ibu termasuk dalam personalia komite sekolah?
4. Apakah para orang tua yang tidak masuk personalia dalam komite sekolah merasa terwakili dengan adanya komite sekolah?

Catatan Lapangan I

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari/Tanggal	: Kamis/ 10 Juli 2008
Waktu	: 15.30 – 16.15 WIB
Lokasi	: Gedung PWNNU Yogyakarta
Sumber Data	: Drs. KH. Habib Abdul Syakur, M. Ag

Deskripsi Data:

Bagaimana sejarah dibentuknya komite sekolah di MAN Gandekan Bantul?

“Sejarahnya ya sebenarnya meneruskan daripada BP3, kalau dulu namanya BP3 kemudian berganti menjadi komite madrasah”.

Bagaimana dengan proses pemilihan ketua komite sekolah?

“Proses pemilihannya berawal dari usulan dari madrasah kemudian diflorkan kepada wali murid dalam pertemuan antara pihak sekolah dan wali murid. Pihak sekolah menunjuk saya sebagai ketua komite sekolah dan disetujui oleh para wali siswa. Untuk periode ini saya telah memasuki periode kedua karena periode sebelumnya juga saya sebagai ketuanya”.

Bagaimana peran komite sekolah secara umum?

“Secara umum komite sekolah itu berperan sebagai ee.. mitra daripada sekolah. Mitra disini artinya komite dapat berperan kepada madrasah misalnya, dari dalam bidang akademik, madrasah mengusulkan kurikulum dan ditawarkan kepada komite sekolah untuk disetujui. Akan tetapi komite juga menawarkan bentuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan menambahkan program ekstrakurikuler misalnya”.

Bagaimana peran komite sekolah dalam pengembangan madrasah?

“Dalam pengembangan madrasah, komite biasanya hanya menangani hal-hal yang tidak terkait dengan kurikulum formal saja. Contohnya sekarang di MAN Gandekan sudah membuka jurusan otomotif. Ide itu berawal

ketika ada workshop nasional di Hotel Hilton Surabaya. Saat itu utusan dari MAN Gandekan adalah kepala sekolah, waka kurikulum dan saya sebagai perwakilan dari komite sekolah. Nah saat itu kita berpikiran ada peluang untuk membuat MAN Kejuruan. Akhirnya MAN Gandekan menyatakan siap untuk menjadi MAN Kejuruan, bekerjasama dengan SMK Sedayu untuk membuka kelas jauh jurusan otomotif di MAN Gandekan”.

Dalam skema pengembangan madrasah nya, MAN Gandekan Bantul akan diarahkan ke mana?

“Seperti di awal tadi, antara komite sekolah dan pihak sekolah bersepakat untuk mengarahkan MAN Gandekan sebagai MAN kejuruan. Pertimbangannya adalah 90 % siswanya itu anak buruh, dan 90 % siswanya (ya itu kira-kira aja ya mas, data pastinya ada di bagian tata usaha sekolah) itu tidak meneruskan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, apa tidak lebih baik MAN Gandekan menjadi lembaga pendidikan yang membekali siswanya dengan keagamaan tetapi juga membekalinya dengan keterampilan”.

Interpretasi:

Komite sekolah MAN Gandekan Bantul adalah lanjutan dari tugas BP3 yang telah berganti menjadi komite sekolah seiring adanya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Komite sekolah MAN Gandekan tidak hanya memberi dukungan terkait dengan hal-hal finansial saja, akan tetapi komite sekolah juga mempunyai peran dalam pengembangan madrasah secara umum baik dalam hal kurikulum maupun peningkatan kualitas sekolah.

Catatan Lapangan II

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari/Tanggal	: Senin/ 21 Juli 2008
Waktu	: 10.30 – 11.05 WIB
Lokasi	: Ruang Kepala Sekolah MAN Gandekan
Sumber Data	: Drs. Imam Sujai Fadly, M. Pd.I

Deskripsi Data:

Bagaimana gambaran situasi dan kondisi MAN Gandekan Bantul secara umum?

“*njenengan* sudah dikasih profil madrasah oleh pak Tohari? Belum pak, jawab saya. Begini mas untuk pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah, perkembangan dan tanggapan masyarakat terhadap sekolah coba dilihat dalam profil madrasah atau tanya pada pak Tohari, soalnya saya tidak tahu persis karena saya baru bertugas di MAN Gandekan sejak Senin kemarin tanggal 14 Juli 2008”.

Apa dasar dan tujuan dibentuknya komite madrasah MAN Gandekan Bantul?

“Dasar dan tujuan dibentuknya komite sekolah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”.

Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dengan komite sekolah?

“Sekolah menjadikan komite sekolah sebagai mitra. Artinya komite sekolah tidak hanya sekedar memberikan stempel saja, malah terkadang komite sekolah menjadi penentu kebijakan di sekolah. Contohnya dengan adanya jurusan otomotif ini kan inisiatif dari komite sekolah yang menginginkan siswa MAN Gandekan mempunyai keterampilan. Komite juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan madrasah.

Interpretasi:

Untuk interview dengan kepala sekolah, peneliti kurang mendapatkan data yang memadai karena kepala sekolah adalah orang baru sehingga belum sempat mendalami seluk-beluk madrasah. Tetapi niat baik madrasah untuk meningkatkan peran komite sekolah dengan melibatkannya dalam setiap kegiatan madrasah

Catatan Lapangan III

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari/Tanggal	: Sabtu/ 26 Juli 2008
Waktu	: 07.30 – 08.15 WIB
Lokasi	: Ruang WaKa MAN Gandekan
Sumber Data	: Drs. Tohari Suyuti

Deskripsi Data:

Bagaimana sejarah dibentuknya komite sekolah di MAN Gandekan Bantul?

“Komite disini sifatnya hanya melanjutkan dari BP3. Dengan adanya edaran dari Dirjen terus namanya berubah. Dulu sempat ada dua versi, yang pertama namanya majlis madrasah, kemudian yang kedua komite madrasah. Akhirnya kita sepakat dengan nama komite madrasah”.

Bagaimana dengan proses pemilihan ketua komite sekolah?

“Untuk ketuanya sekarang ini adalah periode kedua karena periode sebelumnya dipegang orang yang sama yaitu Pak Habib. Untuk personalia kepengurusannya terjadi tambal sulam karena ada salah satu anggota yang meninggal”.

Bagaimana bentuk peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terhadap kebijakan madrasah?

“Ya biasanya segala sesuatu kebijakan marasah terutama yang berkaitan dengan wali siswa tentunya komite memberi pertimbangan-pertimbangan apakah kebijakan tersebut relevan”.

Bagaimana bentuk peran komite sekolah sebagai mediator sekolah dengan pemerintah?

“Ohya komite disini juga seperti itu misalnya, kemarin ketika ada bantuan 23 unit komputer dari Menko Kesra itu yang menangani komite sekolah, jadi sekolah tinggal terima beres”.

Bagaimana peran komite sekolah dalam pengembangan madrasah?

“Komite juga berperan dalam kurikulum, contohnya kemarin ketika pihak sekolah sowan kepada ketua komite sekolah juga sempat adanya obrolan tentang gagasan bahwa MAN Gandekan harus punya ciri khas, baik dalam hal keagamaan, keterampilan, bahasa, maupun yang lainnya”.

Dalam skema pengembangan madrasah nya, MAN Gandekan Bantul akan diarahkan ke mana?

“Ya sudah 3 tahun berjalan madrasah akan diarahkan ke MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) dengan adanya jurusan otomotif. Walaupun secara hukum sampai saat ini kita belum mendapatkan SK sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan. Sekarang ini kita belum menyerah untuk menunggu SK itu turun dengan terus meningkatkan kualitas kejuruan kita”.

Interpretasi:

Komite sekolah MAN Gandekan Bantul diberi nama Komite Madrasah MAN Gandekan Bantul. Komite madrasah juga dilibatkan dalam perencanaan program-program madrasah baik yang kurikuler maupun ekstra kurikuler. Peran komite madrasah sudah bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat ditunjukkan dengan aktifnya komite sekolah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah guna peningkatan kualitas madrasah. MAN Gandekan akan diarahkan ke MAN Kejuruan dengan dibukanya beberapa jurusan antara lain jurusan otomotif, tata busana dan TIK. Semua ini atas

dasar kesepakatan komite sekolah dengan sekolah ketika ada workshop di Jawa Timur.

Catatan Lapangan IV

Metode Pengumpulan Data	: Observasi
Hari/Tanggal	: Kamis/ 28 Agustus 2008
Waktu	: 12.30 – 15.15 WIB
Lokasi	: Ruang Media MAN Gandekan
Sumber Data	: Laporan Pertanggungjawaban dan Pembahasan Rencana Program Madrasah Sekaligus Membahas RAPBM

Deskripsi Data:

Pertemuan kali ini diawali dengan peninjauan perlengkapan laboratorium komputer bantuan dari Menko Kesra dan gedung serba guna yang pengerjaannya ditangani sepenuhnya oleh komite madrasah. Setelah itu dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama komite madrasah dan pihak madrasah.

Rapat sendiri baru dimulai pada pukul 13.00 WIB. Dengan acara pertama adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan madrasah oleh Kepala Madrasah. Setelah itu dilanjutkan dengan tanggapan dari komite madrasah yang menyoroti tentang penyajian laporan yang kurang sistematis sehingga sulit dipahami. Akan tetapi secara garis besar komite puas dengan kinerja sekolah walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Setelah itu pembahasan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Dari komite madrasah mengusulkan agar anggaran untuk kegiatan akademik lebih dimaksimalkan terutama KIR yang pada periode lalu kurang berjalan maksimal. Selain itu komite juga mengusulkan beberapa program yang terkait dengan peningkatan kualitas

madrasah dari berbagai aspek misalnya dalam hal sumber daya manusia (SDM), komite mengusulkan untuk diadakannya pelatihan penelitian dan penulisan laporan ilmiah untuk guru karena dipandang sangat menunjang bagi prestasi guru khususnya guna keperluan sertifikasi. Komite juga mengusulkan agar guru-guru diberi pelatihan media karena pembelajaran sekarang ini sudah mengarah kepada teknologi.

Selain itu, di wilayah infrastruktur, komite madrasah juga mengusulkan perluasan tanah madrasah untuk rencana perkembangan madrasah di masa mendatang. Komite juga menyarankan agar pihak sekolah sering melakukan *home visit* kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi riil peserta didik dari segala aspek baik ekonomi, pembelajaran dan keluhan-keluhan lain yang terkait dengan madrasah.

Interpretasi:

Peran komite madrasah sangat bisa dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari mengalirnya usulan dari komite dan terbukanya pihak madrasah menerima masukan dari komite. Komite juga tidak hanya dilibatkan dalam masalah finansial semata, melainkan komite juga peduli terhadap peningkatan mutu madrasah. Komite mampu memarnkan perannya dengan baik dengan selalu melakukan komunikasi dengan pihak sekolah baik kultural maupun formal. Masukan dari komite maupun wali siswa juga dapat disampaikan lewat telepon sehingga memudahkan untuk berkomunikasi.

Catatan Lapangan V

Metode Pengumpulan Data	: Wawancara
Hari/Tanggal	: Jum'at/ 12 September 2008
Waktu	: 08.30 – 09.19 WIB
Lokasi	: Ruang WaKa MAN Gandekan
Sumber Data	: Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Deskripsi Data :

Dalam kondisi seperti apa komite madrasah memberi pertimbangan pada kebijakan madrasah?

“Ya... dalam hal penyusunan RAPBM, juga termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di dalam madrasah, terutama dalam rangka peningkatan mutu madrasah”.

Sedangkan perannya sebagai pendukung seperti apa?

“Komite selalu *mensupport* kegiatan madrasah, bentuknya setiap ada kegiatan madrasah pengurus atau anggota komite madrasah selalu dilibatkan mewakili dalam setiap forum yang ada”.

Sebagai pengontrol, bentuknya seperti apa?

“Biasanya, karena komite posisinya berada di masyarakat itu ya termasuk misalnya ada suara-suara masyarakat yang katakanlah sumbang terhadap kegiatan atau kinerja madrasah itu komite akan mendengarkan dan melanjutkan ke madrasah kemudian akan dibahas dan dicari solusinya bersama”.

Kemudian terkait dengan fungsi komite sekolah, usaha apa yang telah dilakukan komite untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap pendidikan?

“Usahnya anu mas... diantaranya pelibatan komite terhadap promosi madrasah. Hal ini sangat penting karena komite lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat sehingga akan mudah dalam sosialisasi dan menumbuhkan minat masyarakat dalam pendidikan”.

Pernahkah komite melakukan kerjasama dengan masyarakat terutama dalam kegiatan madrasah?

“Seringnya dalam bakti sosial yang diadakan madrasah. Komite selalu di undang bahkan tidak jarang komite menjadi pembicara karena anggota komite di sini banyak yang termasuk ustadz”.

Bagaimana bentuk penilaian kinerja madrasah oleh komite madrasah?

“Biasanya hanya dilakukan di akhir semester yang berupa laporan pertanggung jawaban”.

Apakah komite juga dilibatkan dalam kriteria perekrutan tenaga kependidikan di madrasah?

“Ya selalu. Komite selalu dipertimbangkan untuk itu karena untuk menjaga iklim madrasah”.

Tentang tujuan dibentuknya komite sebagai wadah aspirasi masyarakat. Apakah ada forum tersendiri antara komite dengan wali siswa?

“Kalau komite dengan wali siswa secara terpisah tidak ada, tapi kalau komite, wali siswa dan pihak sekolah ada. Biasanya forum ini sebagai ajang para wali menyampaikan aspirasinya. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya di luar forum ini artinya secara kultural (kapan dan di mana saja)”.

Menurut bapak, apakah kerjasama antara komite dan pihak madrasah sudah termasuk transparan, akuntabel dan demokratis?

“Sejauh ini sedapat mungkin kerjasama yang dilakukan harus transparan dan demokratis. Setahu saya kerjasama antara komite dan madrasah sampai saat ini tidak ada masalah”.

Interpretasi:

Secara garis besar, komite madrasah MAN Gandekan Bantul telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat dengan

sering dilibatkannya komite madrasah dalam setiap kebijakan dan kegiatan madrasah.

Catatan Lapangan VI

Metode Pengumpulan Data	: Observasi
Hari/Tanggal	: Minggu/ 12 Oktober 2008
Waktu	: 07.30 – 12.15 WIB
Lokasi	: Ruang Serbaguna MAN Gandekan
Sumber Data	: Musyawarah dan Sosialisasi RAPBM Kepada Wali Siswa Kelas X - XII

Deskripsi Data :

Musyawarah ini dibagi menjadi dua sesi, pertama adalah musyawarah antara pihak madrasah dengan wali siswa kelas X, kedua musyawarah dan pengajian bagi wali siswa kelas XI dan XII.

Sesi pertama dimulai pada jam 08.15 WIB diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dipandu oleh pembawa acara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Madrasah yang mengutarakan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan walaupun anaknya disekolahkan, orang tua tetap harus memberikan pendidikan karena orang tua mempunyai waktu lebih banyak berinteraksi dengan anaknya.

Orang tua juga berkewajiban untuk mengurus administrasi sekolah anaknya terutama dalam hal pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Komite Madrasah MAN Gandekan Bantul yang intinya mensosialisasikan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada setiap wali siswa. Dalam forum ini terjadi tarik ulur masalah pembiayaan yang dibebankan kepada wali

siswa. Komite madrasah sebagai fasilitator menyampaikan beberapa keberatan antara lain, biaya yang dipandang terlalu besar (Rp. 500.000), pembulatan yang dipandang tidak perlu (Rp. 481.481 dibulatkan menjadi Rp. 500.000), peruntukan dana pembelian buku mapel UNAS yang dipandang tidak tepat dibebankan pada kelas X, mekanisme pembayaran agar bisa diangsur. Akhirnya setelah negosiasi antara Komite Madrasah sebagai wakli dari wali siswa dengan pihak madrasah, Kepala Madrasah menetapkan pembiayaan untuk kelas X Tahun 2008/2009 sebesar Rp. 500.000 dan paling akhir dibayar pada bulan Januari dengan angsuran secara bebas.

Acara ditutup pada jam 10.00 WIB dengan bacaan hamdalah.

Sesi kedua adalah musyawarah dan pengajian antara pihak madrasah dan wali siswa kelas XI dan XII dimulai pada jam 10.35 dibuka dengan bacaan Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Sambutan pertama oleh Kepala Madrasah yang tidak jauh berbeda dengan ketika musyawarah antara wali siswa kelas X dan pihak sekolah yaitu tentang kewajiban orang tua kepada anaknya khususnya tentang pendidikan

Sambutan kedua oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang menjabarkan program-program madrasah bagi kelas XI dan XII. Bagi kelas XI pihak sekolah akan mengadakan club-club mata pelajaran yang akan diikuti oleh siswa sesuai dengan minat masing-masing dan persyaratan kenaikan kelas salah satunya adalah kemampuan membaca Al-Qur an sehingga diharapkan orang tua juga ikut bekerja sama dalam membimbing anaknya dalam membaca Al-Qur an.

Untuk kelas XII terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2009 pihak sekolah akan mengadakan pelajaran tambahan setelah jam belajar selesai khususnya pelajaran-pelajaran Yang di ujikan secara nasional. Orang tua dimintai kerjasamanya untuk memberi sanga lebih karena pada hari senin

sampai kamis anak kelas XII akan berada di sekolah sampai pukul 16.00 WIB.

Sambutan ketiga oleh Bpk. Paiman sebagai Wakil Komite Madrasah yang mensosialisasikan tentang pembiayaan yang dibebankan pada wali siswa kelas XI dan XII.

Acara dilanjutkan dengan pengajian yang diberikan oleh KH. Nahrowi yang menekankan pentingnya kerjasama antara siswa, pihak sekolah dan orang tua khususnya dalam rangka menghadapi jian Nasional yang semakin dekat.

Acara ditutup pada jam 12.10 WIB dengan bacaan hamdalah.

Interpretasi:

Sisialisasi RAPBM ini sangat berjalan menarik dengan banyaknya respon dari wali siswa yang menanyakan tentang program-program madrasah.

Komite sebagai mediator antara wali siswa dengan pihak sekolah sangat berperan aktif menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada.

Sayangnya hal ini hanya terjadi ketika pertemuan dengan wali siswa kelas X saja. Hal bertolak belakang dengan ketika pertemuan dengan Wali siswa kelas XI dan XII. Pada kesempatan ini komite sekolah tidak memberikan waktu kepada wali siswa untuk menyampaikan keberatan dan aspirasinya kepada madrasah. Hal ini mungkin terjadi karena terbatasnya waktu yang ada.

CURRICULUM VITAE

1. BIODATA

- ❖ N a m a : DIAN YUDA PRASTIA
- ❖ Tempat/tanggal Lahir : Brebes, 12 Juli 1985
- ❖ Jenis Kelamin : Laki-laki
- ❖ Agama : Islam
- ❖ Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Al-Hikmah
- ❖ Status : Belum Menikah
- ❖ Alamat : Kretek Al-Barokah No. 16 RT. 06 RW. 04 Kretek
Paguyangan Brebes Jawa Tengah 52276
- ❖ No. Hp : 085 721 868 838 / 085 228 696 829
- ❖ E-mail : ifandzo@yahoo.co.id

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ 1992 – 1998 : SD Negeri 04 Kretek
- ❖ 1998 – 2001 : MTs Al Hikmah Benda
- ❖ 2001 – 2004 : Madrasah Aliyah Al Hikmah Benda
- ❖ 2004 – 2009 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.

3. PENDIDIKAN NON FORMAL

- ❖ Madrasah Mu'allimin Al Hikmah 1998-2004
- ❖ Madrasah Diniyah Al Barokah

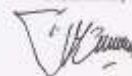
4. PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ Divisi Pendidikan OSIS MA Al Hikmah
- ❖ PMII Rayon Fakultas Tarbiyah

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2008

Penulis,



Dian Yuda Prastia
NIM. 04410843